



BAB I

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan sekaligus aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencerminkan kinerja lembaga secara optimal.

Sejalan dengan perkembangan terhadap berbagai aspek aparatur negara, terdapat satu isu yang mengemuka yang terjadi dalam perkembangan sektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintah. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka pemenuhan hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar inspirasinya (*right to be heard and listened to*). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya (*managerial accountability*), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas (*public accountability*).

Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Dengan dasar tersebut, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. Tujuan

SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem tersebut adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LKIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2018.

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2018 adalah:

1. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. PERSONIL

a. Tugas

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan umum Bidang Pendidikan;
- b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;

- e. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, diketahui jumlah Pejabat Struktural (Eselon II, III dan IV) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebanyak 21 orang, Staf sebanyak 98 orang, dan kelompok fungsional yang terdiri dari pengawas sekolah rumpun mata pelajaran sebanyak 23 orang, pengawas TK/SD sebanyak 102 orang, penilik sebanyak 59 orang, sehingga total tenaga fungsional sebanyak 240 orang. Dengan demikian total pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebanyak 543 orang. Dari jumlah tersebut yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 526 orang, selebihnya sebesar 17 orang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta dibantu oleh 27 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari Dinas Pendidikan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dengan jabatan /golongan latar belakang pendidikan sebagaimana pada tabel berikut:

**Data Pejabat Struktural dan Staf Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan Tahun 2018**

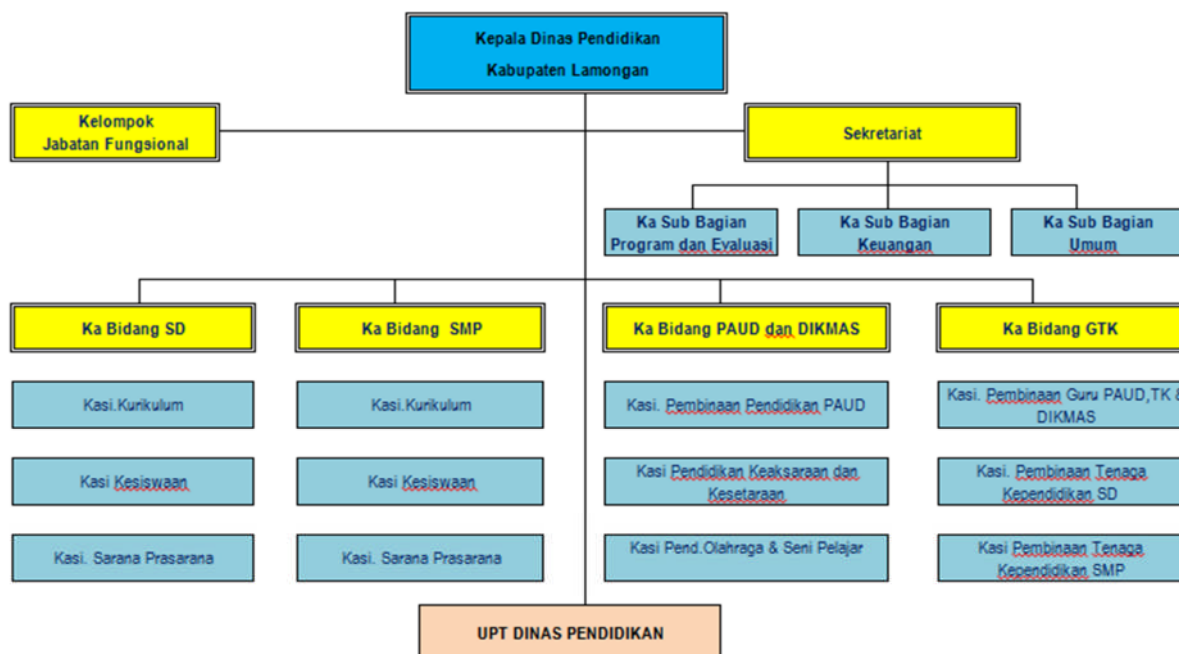
| Unit Kerja | Eselon | | | P N S / Golongan | | | |
|--|--------|----------|----------|------------------|----------|-----------|----------|
| | II | III | IV | I | II | III | IV |
| *) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan | 1 | | | | | | 1 |
| - Sekretaris | | 1 | | | | | 1 |
| Sub Bag Program & Evaluasi | | | 1 | | 2 | 2 | 1 |
| Sub Bag Keuangan | | | 1 | | 1 | 6 | |
| Sub Bag Umum | | | 1 | | 3 | 7 | 2 |
| Jumlah | | 1 | 3 | | 6 | 15 | 5 |
| - Ka Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan | | 1 | | | | 1 | |
| Seksi Pembinaan Guru PAUD, TK dan Pendidikan | | | 1 | | | 2 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|--|----------|-----------|----------|
| Masyarakat. | | | | | | | |
| Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan SD. | | | 1 | | | 5 | |
| Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP. | | | 1 | | | 4 | |
| Jumlah | | 1 | 3 | | | 11 | 1 |
| - Ka Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat | | 1 | | | | | 1 |
| Seksi Pembinaan PAUD. | | | 1 | | | 3 | |
| Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Seksi Olahraga dan Seni Pelajar. | | | 1 | | | 5 | 1 |
| Jumlah | | 1 | 3 | | | 9 | 3 |
| - Ka Bidang Pendidikan SD | | 1 | | | | | 1 |
| Seksi Kurikulum. | | | 1 | | 2 | 1 | 1 |
| Seksi Sarana Prasarana | | | 1 | | | 4 | 1 |
| Seksi Kesiswaan. | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | | 1 | 3 | | 3 | 6 | 4 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Adapun bagan organisasinya adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017**



Tugas pokok masing – masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Pendidikan

Mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan.

2) Sekretaris

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan keuangan, dan keprotokolan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Dan mempunyai sub bagian program dan evaluasi, sub bagian keuangan dan sub bagian umum.

3) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan masyarakat. Bidang guru dan tenaga kependidikan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Dan mempunyai 3 seksi yakni seksi pembinaan guru PAUD, TK dan pendidikan masyarakat, seksi pembinaan tenaga kependidikan SD, Seksi pembinaan tenaga kependidikan SMP.

4) Bidang PAUD dan Kependidikan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Bidang PAUD dan kependidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dan mempunyai 3 seksi yakni seksi pembinaan PAUD, seksi pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, seksi olahraga dan seni pelajar.

5) Bidang Pendidikan SD

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah dasar. Bidang pendidikan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, dan mempunyai tiga seksi yakni, seksi kurikulum, seksi sarana prasarana dan seksi kesiswaan.

6) Bidang Pendidikan SD

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan SMP. Bidang pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, dan mempunyai tiga seksi yakni, seksi kurikulum, seksi sarana prasarana dan seksi kesiswaan.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis di atur dengan peraturan BUPATI.

2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, adapun Sarana dan Prasarana yang dapat disampaikan pada laporan ini sebanyak 49 komponen sebagaimana Tabel berikut :

**Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan
Tahun 2018**

| No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah | Kondisi | | | | |
|----|--------------------------|--------|----------------|-------|----------------------|----------------------|--|
| | | | Lengkap / baik | | Cukup / rusak sedang | Kurang / rusak berat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 1 | Tanah Perkantoran | 8.402 | 8.402 | 8.402 | | | |
| 2 | Mobil Dinas Roda 4 | 8 | 8 | 8 | | | |
| 3 | Sepeda Motor | 48 | 48 | 48 | | | |
| 4 | Meja Eselon 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 5 | Kursi Eselon 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 6 | Lambang Garuda Pancasila | 10 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 7 | Gambar Foto Presiden | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 8 | Gambar Foto Wakil Presiden | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 9 | Foto Bupati Lamongan | 15 | 15 | 15 | | | | |
| 10 | Wakil Foto Bupati Lamongan | 15 | 15 | 15 | | | | |
| 11 | Meja Eselon 3 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 12 | Kutrsi Eselon 3 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 13 | Meja Eselon 4 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 14 | Kursi Eselon 4 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 15 | Meja Staf | 110 | 110 | 110 | | | | |
| 16 | Kursi Staf | 110 | 110 | 110 | | | | |
| 17 | Kursi Hadap | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 18 | Kursi Lipat | 312 | 312 | 312 | | | | |
| 19 | Meja untuk mesin ketik | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 20 | Mesin Ketik | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 21 | Filing kabinet | 30 | 30 | 30 | | | | |
| 22 | Rak besi | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 23 | Lemari kayu | 11 | 11 | 11 | | | | |
| 24 | Lemari kaca | 9 | 9 | 9 | | | | |
| 25 | Kumputer | 60 | 60 | 60 | | | | |
| 26 | Meja computer | 52 | 52 | 52 | | | | |
| 27 | Jam dinding | 15 | 15 | 15 | | | | |
| 28 | Pesawat Televisi | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 39 | Papan kegiatan | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 30 | Rak kayu kecil | 9 | 9 | 9 | | | | |
| 31 | Tape Recorder | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 32 | Meja Kursi Tamu | 9 | 9 | 9 | | | | |
| 33 | Pesawat Telepon | 13 | 13 | 13 | | | | |
| 34 | Faximile | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 35 | Kamera Digital | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 36 | Meja Rapat Ukuran Besar | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 37 | Papan rapat | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|--|--|--|--|
| 38 | AC | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 39 | Peta Kabupaten Lamongan | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 40 | Lemari besi | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 41 | Kipas Angin | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 42 | Laptop | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 43 | Brankas | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 44 | OHP / LCD | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 45 | Meja Rapat | 77 | 77 | 77 | | | | |
| 46 | Podiom | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 47 | Soun Sistem | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 48 | Scaner untuk pemindahan data | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 49 | Note Book | 8 | 8 | 8 | | | | |
| 50 | Printer | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 51 | Handycam | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 52 | Dual Temperatur Pharmaceutical Refrigerator | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 53 | Manual Breast Pump | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 54 | Glass Nursing Bottle | 8 | 8 | 8 | | | | |
| 55 | Bottle Sterilzer | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 56 | Ice Pak | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 57 | Sofa Set | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 58 | Instrumen Cabinet | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 59 | Mobile Washafel | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 60 | Tempat Sampah dengan penutup | 1 | 1 | 1 | | | | |

Sumber data : Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Tahun 2018

3. PEMBIAYAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. **755.100.039.196,03** terealisasi sebesar Rp. **729.364.465.009,00** atau **96,59%** dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 611.256.803.196,03 terealisasi sebesar Rp. 586.811.190.798,00 atau 96,00% Belanja Langsung Rp. 143.843.236.000 dan terealisasi sebesar Rp. 142.553.274.211 atau 99,10% Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Program dan Kegiatan

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Belanja Langsung | 143.843.236.000 | 142.553.274.211 | 99,10% |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 9.705.753.000 | 9.460.642.141 | 97,47% |
| 1 | 1 Penyediaan Jasa Perkantoran | 8.276.353.000 | 8.076.273.541 | 97,58% |
| 2 | 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran | 777.000.000 | 734.972.600 | 94,59% |
| 3 | 3 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 50.000.000 | 49.996.000 | 99,99% |
| 4 | 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Pendidikan | 602.400.000 | 599.400.000 | 99,50% |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 693.000.000 | 682.660.000 | 98,51% |
| 1 | 1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 338.000.000 | 337.860.000 | 99,96% |
| 2 | 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 75.000.000 | 64.900.000 | 86,53% |
| 3 | 3 /Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 200.000.000 | 199.900.000 | 99,95% |
| 4 | 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 80.000.000 | 80.000.000 | 100,00% |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 28.800.000 | 18.800.000 | 65,28% |
| 1 | 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal | 28.800.000 | 18.800.000 | 65,28% |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 90.000.000 | 90.000.000 | 100,00% |
| 1 | 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00% |
| 2 | 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | 45.000.000 | 45.000.000 | 100,00% |
| 3 | 3 Forum OPD | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% |
| 5 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 15.438.100.000 | 15.384.699.470 | 99,65% |

| | | | | |
|----|---|------------------|------------------|---------|
| 1 | Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini | 5.115.900.000,00 | 5.084.250.000,00 | 99,38% |
| 2 | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 91.200.000,00 | 91.200.000,00 | 100,00% |
| 3 | Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00% |
| 4 | Festival Dolanan Anak | 100.000.000,00 | 99.100.000,00 | 99,10% |
| 5 | Pelaksanaan Hari Anak | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100,00% |
| 6 | Rehab sedang/berat bangunan Sekolah PAUD/TK | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | 100,00% |
| 7 | Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD | 731.000.000,00 | 730.999.200,00 | 99,99% |
| 8 | Pengadaan alat peraga dan praktek siswa PAUD (DID) | 4.170.000.000,00 | 4.161.485.000,00 | 99,80% |
| 9 | Pengadaan Pakaian seragam guru PAUD | 1.600.000.000,00 | 1.596.458.670,00 | 99,78% |
| 10 | Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah Bagi Lembaga PAUD | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00% |
| 11 | Implementasi Managemen Pendidikan Dalam Peningkatan Kemandirian Lembaga Kb/Tk | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00% |
| 12 | Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri | 400.000.000,00 | 397.200.000,00 | 99,30% |
| 13 | Fasilitasi Rintisan Desa Pintar | 300.000.000,00 | 299.400.000,00 | 99,80% |
| 14 | Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00% |
| 15 | Evaluasi Program Keaksaraan dan Kesetaraan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00% |
| 16 | Penyelenggraan Paket A Setara SD | 50.000.000,00 | 49.400.000,00 | 98,80% |
| 17 | Penyelenggraan Paket B Setara SMP | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00% |
| 18 | Sosialisasi Program Delapan Belas Dua Puluh Satu (18.21) | 100.000.000,00 | 99.999.400,00 | 100,00% |
| 19 | Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah / Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Madarasah Dan Guru Swasta (Bppdmgs) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00% |
| 20 | Fasilitasi Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% |
| 21 | Lomba Warga Belajar Program Keaksaraan Usaha Mandiri | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% |
| 22 | Peduli Keamanan Sekolah (PKS) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% |
| 23 | Pengiriman Kontingen Olimpiade Olahraga SD, dan SMP | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00% |
| 24 | Pelaksanaan POR SD Tingkat Provinsi | 150.000.000,00 | 148.950.000,00 | 99,30% |
| 25 | Penyelenggaraan POPDA Tingkat Kabupaten | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00% |
| 26 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Beladiri/Karate | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00% |
| 27 | Peringatan HARDIKNAS | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 100,00% |
| 28 | Lomba Karya Tulis Ilmiah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00% |
| 29 | Festifal Dan Lomba Seni Siswa Nasional | 100.000.000,00 | 99.400.000,00 | 99,40% |

| | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | (FLS2N) | | | |
| 30 | Pembinaan Olahraga Siswa Sejak Dini | 900.000.000,00 | 896.857.200,00 | 99,65% |
| 6 | Program Pendidikan Sekolah Dasar | 81.261.943.200,00 | 80.322.863.200,00 | 98,84% |
| 1 | Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah/Bantuan Kepada Lembaga SD/MI Swasta | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00% |
| 2 | Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% |
| 3 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bagi siswa Tidak Mampu SD | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00% |
| 4 | Fasilitasi Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu jenjang SD/SMP | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% |
| 5 | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00% |
| 6 | Operasional Dana BOS | 70.385.720.000,00 | 9.516.320.000,00 | 98,76% |
| 7 | Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD dan Pemantapan | 500.000.000,00 | 498.101.500,00 | 99,62% |
| 8 | Pengadaan Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek Al-Qur An | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00% |
| 9 | Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kesiswaan SD | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00% |
| 10 | Pengembangan Kurikulum 2013 Jenjang SD | 100.000.000,00 | 99.091.000,00 | 99,09% |
| 11 | Pengadaan Buku Raport SD | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% |
| 12 | Pengadaan Mebeluer Sekolah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00% |
| 13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar | 3.200.000.000,00 | 3.182.605.000,00 | 99,46% |
| 14 | Rehabilitasi Jamban SD | 2.179.035.400,00 | 2.179.035.400,00 | 100,00% |
| 15 | Rehab Sedang/Berat Ruang Perpustakaan/RKB SD (DAK) | 1.570.318.400,00 | 1.570.318.400,00 | 100,00% |
| 16 | Pembangunan Jamban SD | 846.318.400,00 | 846.318.400,00 | 100,00% |
| 17 | Peningkatan Sarana Koleksi perpustakaan SD | 1.675.551.000,00 | 1.626.073.500,00 | 97,05% |
| 18 | Penyusunan Sistem dan Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00% |
| 7 | Program Pendidikan Sekolah Menengah | 35.715.639.800,00 | 35.684.009.900,00 | 99,91% |
| 1 | Pembinaan SMP Terbuka | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bagi siswa Tidak Mampu SMP | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00% |
| 3 | Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah Kepala Lembaga SMP/MTS | 100.000.000,00 | 99.175.000,00 | 99,18% |
| 4 | Penyelenggaraan Ujian Tingkat SMP dan Pemantapan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00% |
| 5 | Pelatihan Olimpiade Berprestasi Sampai Tingkat Internasional | 250.000.000,00 | 228.250.000,00 | 91,30% |
| 6 | Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 100,00% |
| 7 | Penyelenggaraan Akreditasi SMP | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 8 | Penyediaan Buku Raport, Buku Induk Dan Daftar Kumpulan Nilai Untuk SMP | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00% |
| | 9 | Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa SMP | 619.225.000,00 | 619.225.000,00 | 100,00% |
| | 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama | 9.550.000.000,00 | 9.544.193.500,00 | 99,94% |
| | 11 | Singkronisasi Dan Evaluasi Program Kegiatan Pendidikan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00% |
| | 12 | Rehab Sedang/Berat bangunan Sekolah Menengah Pertama (DAK) | 6.913.373.000,00 | 6.913.373.000,00 | 100,00% |
| | 13 | Rehab Sedang/berat Bangunan SD (DAK) | 9.923.041.800,00 | 9.919.870.800,00 | 99,97% |
| | 14 | Peningkatan penunjang prasarana SMP | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00% |
| | 15 | Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Berbasis Komputer | 7.250.000.000,00 | 7.249.997.600,00 | 100,00% |
| | 16 | pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP (DAK) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00% |
| | 17 | Pengadaan Meubelair SMP | 240.000.000,00 | 239.925.000,00 | 99,97% |
| | 18 | Penyusunan Profil Pendidikan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00% |
| | 19 | Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 100,00% |
| 8 | | Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 910.000.000,00 | 909.599.500,00 | 99,96% |
| | 1 | Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik KB/TK | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00% |
| | 2 | Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% |
| | 3 | Penilaian Angka Kredit (PAK) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00% |
| | 4 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% |
| | 5 | Forum Ilmiah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 50.000.000,00 | 49.600.000,00 | 99,20% |
| | 6 | Bimbingan teknis ASSET | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00% |
| | 7 | Peningkatan kompetensi guru SMP | 500.000.000,00 | 499.999.500,00 | 100,00% |
| | 8 | Seleksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan berdedikasi | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% |

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 yang meliputi RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pengukuran kinerja 2018, analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, hambatan dan antisipasinya dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.